

Dinamika Diplomasi Pertahanan Indonesia di Kawasan Asia Tenggara

Didik Prihartono

Sekolah Staf dan Komando TNI AL Jakarta, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta, Indonesia

Email: dinoika111216@gmail.com

Abstrak

Dinamika kawasan Asia Tenggara dan pengaruhnya bagi Indonesia peran diplomasi pertahanan dalam mengatasi tantangan di bidang pertahanan. ASEAN Defence Ministerial Meeting: Mekanisme diplomasi pertahanan Indonesia di Asia Tenggara. Relevansi industri pertahanan dalam penguatan diplomasi pertahanan Indonesia. Kepentingan Nasional: Implementasi Diplomasi Pertahanan Dinamika diplomasi pertahanan Indonesia di kawasan Asia Tenggara dan pengaruhnya terhadap Industri Pertahanan dalam upaya peningkatan kapabilitas pertahanan nasional. Penulisan ini membahas mengenai dinamika diplomasi pertahanan Indonesia di kawasan Asia Tenggara berdasarkan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur atau kajian pustaka atau. Data dari proses penggalian sumber data melalui studi kepustakaan (*Library research*) berupa buku-buku, jurnal atau artikel, arsip, surat kabar, dan internet, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teori yang relevan dengan topik yang akan dibahas. Indonesia dipandang strategis dan penting dari sudut kepentingan negara baik di tingkat regional maupun global. Di Asia Tenggara, isu pertahanan telah terwujud dalam diplomasi pertahanan yang telah dilakukan baik secara bilateral maupun multilateral. ASEAN perlu bekerja sama dengan menggelar pertemuan rutin melalui mekanisme ASEAN Defence Ministerial Meeting (ADMM). ADMM merupakan kerangka untuk menggelar dialog dan mencapai kerjasama dalam bidang keamanan. Indonesia merupakan negara terbesar di kawasan Asia Tenggara, baik dari segi luas wilayah maupun jumlah populasi. Di Indonesia, diplomasi pertahanan telah menjadi alat penting dalam kebijakan pertahanan dan keamanan suatu negara. Hal ini adalah hasil kepercayaan dan apresiasi negara-negara pada pertemuan-pertemuan multilateral untuk mendiskusikan masalah keamanan dalam level regional maupun internasional dalam upaya peningkatan kapabilitas pertahanan dan tujuan nasional.

Kata Kunci: Diplomasi Pertahanan, Industri Pertahanan, Asia Tenggara



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara terbesar di kawasan Asia Tenggara, baik dari segi luas wilayah maupun jumlah populasi. Indonesia juga dipandang strategis dan penting dari sudut pandang kepentingan negara-negara baik di tingkat regional maupun global. Dengan pelbagai modal besar yang dimilikinya, Indonesia tampil percaya diri sebagai pemimpin di kawasan Asia Tenggara dengan menjadi *leader state* di kawasan tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan Indonesia adalah melalui diplomasi pertahanan dan pembangunan kebijakan Kekuatan Pokok Minimum (Lubis, 2016).

Di Asia Tenggara sendiri, isu pertahanan telah terwujud dalam diplomasi pertahanan yang telah dilakukan baik secara bilateral maupun multilateral. Secara umum, ada empat pola kerjasama keamanan di Asia Tenggara. Pola pertama adalah kerjasama pertahanan multilateral antara *external powers*, dan negara-negara di Asia Tenggara yang ditujukan untuk masalah keamanan tertentu. Pola kedua adalah kerjasama pertahanan dan keamanan yang dipimpin Amerika dengan perjanjian kerjasama dengan sekutu, partner strategis. Pola ketiga adalah upaya kerjasama multilateral yang dipimpin oleh China untuk mengikat ASEAN menjadi struktur kerjasama keamanan regional Asia Timur dengan fokus utama pada isu-isu keamanan

non-tradisional. Dan pola terakhir adalah kerjasama multilateral dengan ASEAN sebagai pusatnya untuk meningkatkan kerjasama keamanan baik diantara anggotanya maupun mitra dialog dan diantara anggota ASEAN Regional (ARF) (Saragih, 2018, p. 49).

Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap Negara memiliki kepentingan tersendiri dalam hal ekonomi, politik, dan kepentingan nasional mereka, tetapi untuk menjaga stabilnya kawasan, peningkatan pertahanan wajib dibentuk bersama karena menyangkut kelancaran masing-masing kepentingan yang hendak dicapai serta keuntungan (*benefit*) yang didapat. Selain itu, mencakup lancarnya komunikasi antar negara, kelancaran ekonomi, dan dapat mendekatkan hubungan secara bilateral maupun multilateral (Saragih, 2018, p. 50). Dalam meraih kepentingan nasionalnya, suatu negara selalu bertujuan memproteksi kontinuitas kehidupan dan keperluan tiap warga negaranya. Dalam usaha memproteksi keberadaan sebuah negara, maka pemerintah di suatu negara mempunyai strategi dan kekuasaan untuk mengendalikan dan menetapkan kebijakan di negaranya sendiri (Alunaza & Toy, 2019). Upaya tersebut tentu harus dilakukan demi terwujudnya citra positif Indonesia, salah satunya melalui diplomasi pertahanan.

Kedaulatan merupakan suatu sasaran yang hendak dituju oleh masing-masing negara yang menyangkut tujuan yang ingin dicapai oleh negara tersebut. Salah satu kunci kesuksesan atas kepentingan nasional dan juga diupayakan sebaik mungkin pelaksanaannya. Akan tetapi dalam perkembangannya, *national capital* memunculkan banyak perubahan sehingga dapat menyebabkan akibat yang cukup berbahaya terhadap pertahanan dan keamanan negara Indonesia (Arif et al., 2020, p. 132). Tulisan ini akan membahas mengenai bagaimana dinamika diplomasi pertahanan Indonesia di kawasan Asia Tenggara dan pengaruhnya terhadap Industri Pertahanan dalam upaya peningkatan kapabilitas pertahanan nasional.

METODE PENELITIAN

Penulisan ini membahas mengenai dinamika diplomasi pertahanan Indonesia di kawasan Asia Tenggara berdasarkan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka. Data dari proses penggalan sumber data melalui studi kepustakaan (*Library research*) berupa buku-buku, jurnal atau artikel, arsip, surat kabar, dan internet, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teori yang relevan dengan topik yang akan dibahas (Moleong, 2007).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dinamika Kawasan Asia Tenggara dan Pengaruhnya Bagi Indonesia

Asia Tenggara telah lama menjadi salah satu kawasan yang sangat strategis khususnya secara geopolitik. Kondisi ini membawa konsekuensi terhadap banyaknya kepentingan-kepentingan asing yang kemudian seringkali berbenturan dengan kepentingan negara-negara yang berada di dalam kawasan. Kepentingan ini senantiasa didominasi dengan upaya negara-negara luar untuk menciptakan stabilitas di dalam kawasan untuk kepentingan keamanan bagi negaranya dimana harus berhadapan dengan kepentingan pertahanan negara-negara yang berada di dalam kawasan tersebut. Kondisi ini diperkuat pula dengan gelombang globalisasi yang kemudian mengaburkan sekat-sekat kawasan yang menimbulkan apa yang disebut dengan intregasi kawasan dalam berbagai bidang yang berkonsekuensi pada interdependensi dari negara-negara di dalam kawasan (Rusfiana, 2018, p. 146).

Dinamika kawasan terkait dengan keamanan dan pertahanan membawa konsekuensi mengenai perilaku dari negara-negara khususnya yang berada di Asia Tenggara. *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) memang telah memberikan dasar berperilaku negara-negara di dalamnya, satu dengan lainnya maupun dengan kekuatan eksternal yang menekankan

kepada kerja sama serta membangun rasa saling percaya (*Confidence Building Measurement*), khususnya dalam bidang pertahanan dan keamanan. Kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari relasi sejarah konflik yang dimiliki oleh negara-negara di dalam kawasan itu sendiri, khususnya negara-negara besar seperti Malaysia dan Indonesia (Cipto, 2006, p. 15). Indonesia memiliki sejarah panjang sebagai sebuah negara besar di kawasan ini dan menjadi **penyeimbang** bagi dinamika keamanan kawasan.

Beberapa tahun belakangan, dinamika keamanan di Asia Tenggara kembali berubah seiring dengan munculnya Cina sebagai kekuatan baru di Asia yang mengarahkan kebijakannya di kawasan Asia Tenggara khususnya terkait dengan kepentingan di Laut China Selatan. Cina terus memodernisasi militernya dan merubah fokusnya ke kawasan Selatan, dimana secara khusus, Cina sangat meningkatkan kekuatan Angkatan Lautnya, dalam rangka memfokuskan pada Laut Cina Selatan, sebuah wilayah yang di klaim Cina sebagai teritorinya (Triwahyuni, 2010, p. 41). Kondisi ini tentu saja harus dihadapi dan dikelola dengan baik oleh negara-negara yang berada di Asia Tenggara, karena apabila tidak, konsekuensi ancaman keamanan terkait dengan konflik bersenjata akan sangat berpotensi untuk terjadi baik antara Cina dan AS sebagai kekuatan eskternal maupun antara Cina dengan negara-negara di Asia Tenggara yang juga memiliki klaim kepemilikan wilayah di Laut Cina Selatan.

Bagi Indonesia, dinamika keamanan kawasan Asia Tenggara memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kepentingan pertahanan yang ingin dicapai. Oleh karena itu diperlukan sebuah upaya untuk mengkomunikasikan kepentingan pertahanan tersebut kepada negara-negara di kawasan. Komunikasi ini menjadi sangat penting mengingat kekhawatiran akan terjadinya misinterpretasi dari negara-negara di dalam kawasan terhadap kebijakan pertahanan Indonesia. Hal ini pada akhirnya berpotensi membawa instabilitas keamanan di kawasan terkait dengan timbulnya rasa saling curiga diantara sesama negara di kawasan maupun dengan negara di luar kawasan. Rasa saling curiga tersebut tidak dapat dilepaskan dari mentalitas konflikatif. Keamanan nasional merupakan kunci bagi keamanan regional merupakan modal dasar bagi terbinanya perdamaian dunia. Oleh karena itu, Indonesia senantiasa berupaya untuk memelihara keamanan di kawasan Asia Tenggara dengan berbagai cara khususnya melalui dialog-dialog konstruktif baik dengan sesama negara Asia tenggara maupun dengan negara lain di luar kawasan.

Peran Diplomasi Pertahan dalam Mengatasi Tantangan di Bidang Pertahanan

Dalam perspektif Indonesia, dengan politik luar negerinya yang bebas aktif serta selalu berpartisipasi aktif dalam memelihara perdamaian dunia, maka diplomasi pertahanan akan didefinisikan sebagai segala upaya atau kegiatan yang dilakukan dalam berhubungan dengan negara-negara lain di sektor pertahanan dengan menggunakan sumber daya dan kemampuan pertahanan yang ada, dengan tujuan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam kebijakan pertahanan. Diplomasi pertahanan berbeda dengan jenis diplomasi-diplomasi yang lain, seperti di sektor politik yang dilakukan oleh Kemlu, di sektor ekonomi yang dilakukan oleh kementerian-kementerian yang terkait dengan ekonomi (Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Industri, dan lain-lain), serta di sektor sosial budaya yang dilakukan oleh kementerian-kementerian yang terkait dengan sosial budaya (Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, dan lain-lain). Adapun sumber daya yang digunakan dalam diplomasi pertahanan yaitu sumber daya yang dimiliki oleh sektor pertahanan, seperti personel, peralatan, dan pengetahuan dan keterampilan di bidang pertahanan. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah untuk mendukung terealisasinya kebijakan pertahanan, yaitu mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan

terhadap keutuhan bangsa dan negara, serta ikut serta memelihara perdamaian dunia (Anwar, 2018).

Diplomasi pertahanan diselenggarakan dengan berpegang teguh pada beberapa prinsip yang mendasar. Prinsip pertama adalah bahwa diplomasi pertahanan harus dijalankan dalam koridor yang berada diantara kebijakan pertahanan dan kebijakan luar negeri pemerintah. Hal ini mengandung arti bahwa dalam mencapai misi yang digariskan oleh kebijakan pertahanan, diplomasi pertahanan juga merupakan sub-sistem dari diplomasi yang dimotori oleh Kementerian Luar Negeri (Kemlu). Aplikasi di lapangannya dapat beragam, sebagai contoh dalam konteks kerja sama bilateral, pembuatan perjanjian di bidang pertahanan (*Defence Cooperation Agreement*) dilakukan atas dasar ketentuan yang telah digariskan dalam peraturan pembuatan perjanjian internasional dan penandatungannya memerlukan persetujuan (*full power*) yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Menteri Luar Negeri. Pengiriman pasukan pemelihara perdamaian dalam misi Perserikatan bangsa-Bangsa, memerlukan pertimbangan politik yang dikeluarkan oleh Kemlu, dan selanjutnya atas keputusan Presiden RI. Dalam konteks regional, forum-forum pertemuan di bidang pertahanan merupakan bagian dari forum-forum politik luar negeri, seperti ADMM (*ASEAN Defence Ministers' Meeting*) merupakan bagian dari APSC (*ASEAN Political Security Community*). Prinsip yang kedua adalah bahwa penyelenggaraan diplomasi pertahanan perlu menerapkan politik luar negeri yang memang peran hakikinya adalah sebagai alat perdamaian, bukan perlengkapan perang.

Dalam lingkup praktik di lapangan, diplomasi diaplikasikan dalam bentuk Kegiatan Kerjasama (*cooperative activities*), yaitu kegiatan yang dilakukan oleh institusi Kemhan dan TNI baik secara individual maupun dalam bentuk unit-unit operasional dengan individual atau unit-unit operasional yang berasal dari negara lain baik secara bilateral maupun multilateral. Dilihat dari forum yang digunakan dalam kegiatan ini, maka Kegiatan Kerjasama dilakukan dalam bentuk kegiatan kerjasama bilateral, yaitu kegiatan yang dilakukan antara Kemhan atau TNI dengan suatu negara sahabat dan kegiatan kerjasama multilateral, yaitu kegiatan yang dilakukan antara Kemhan atau TNI dengan beberapa negara lainnya. Selain itu, diplomasi pertahanan juga diimplementasikan dengan kegiatan misi perdamaian (*peace mission*), yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pejabat atau perwira Kemhan atau TNI baik secara individual maupun dalam kelompok atau kontingen dalam tugas-tugas misi perdamaian dunia maupun mediasi dalam pertikaian (Budi & Berantas, 2014, p. 166).

ASEAN Defence Ministerial Meeting: Mekanisme Diplomasi Pertahanan Indonesia di Asia Tenggara

Dalam bidang pertahanan, ASEAN perlu untuk bekerja sama dengan menggelar pertemuan rutin melalui mekanisme *ASEAN Defence Ministerial Meeting* (ADMM). ADMM pertama kali digelar pada tahun 2006 dengan mengambil tempat di Kuala Lumpur. ADMM merupakan kerangka untuk menggelar dialog dan mencapai kerjasama dalam bidang praktis untuk menangani masalah yang terkait dengan keamanan baik yang bersifat tradisional dan non-tradisional termasuk didalamnya adalah masalah keamanan maritim, penanganan bencana dan respon darurat, operasi perdamaian, *peace-building* pasca konflik, bantuan kemanusiaan dan kerja sama dalam bidang lainnya.

Bagi Indonesia, ADMM menjadi salah satu mekanisme yang sangat efektif dalam mengimplementasikan diplomasi pertahanan. Hal ini terkait dengan sifat dari ADMM yang merupakan forum multilateral yang mempertemukan sesama negara di Asia Tenggara maupun dengan negara-negara di luar kawasan melalui mekanisme ADMM plus. Indonesia memanfaatkan berbagai dialog konstruktif yang digelar untuk menyampaikan berbagai kebijakan pertahanan yang terkait dengan respon Indonesia terhadap dinamika keamanan baik

yang berasal dari dalam kawasan, dari dinamika keamanan global serta dinamika keamanan domestik yang ada di Indonesia. ADMM memiliki dua arti strategis, yakni pertama sebagai upaya untuk memperlambat hubungan dengan negara-negara di Asia Tenggara khususnya dalam bidang pertahanan. Kedua, untuk menjalankan peranan sebagai stabilisator kawasan Asia Tenggara dari masuknya kepentingan-kepentingan pihak asing khususnya dalam bidang keamanan yang bila tidak dikelola dengan baik akan mengancam kepentingan nasional Indonesia.

Permasalahan yang mengganggu citra pertahanan Indonesia adalah kurang memadainya Alat Utama Sistem Persenjataan yang dimiliki oleh Tentara Nasional Indonesia sebagai garda terdepan dalam sistem pertahanan Indonesia. Indonesia yang dahulu menjadi salah satu negara dengan kekuatan militer terbesar di Asia Tenggara bahkan Asia, harus menerima kenyataan pahit saat ini secara kualitas dan kuantitas tertinggal dengan negara-negara lain di Asia Tenggara. Kondisi ini tentu saja mengurangi kredibilitas Indonesia, khususnya terkait dengan peran sebagai stabilisator kawasan Asia Tenggara. Kondisi ini membuat Indonesia perlu untuk memperkuat kembali perannya di Asia Tenggara, khususnya dalam bidang keamanan. Upaya untuk membangun kembali sistem pertahanan dengan memperkuat Alutsista menjadi salah satu keharusan yang tidak dapat ditunda lagi sebagai bentuk strategi diplomasi militer berupa pembangunan fisik (Arif et al., 2020, p. 140). Melalui program *Minimum Essential Forces* (MEF) menjadi upaya untuk membangun kekuatan pertahanan minimum bagi TNI pada tiga matryanya. Kebijakan ini tidak hanya dapat dilihat dalam dampak secara internal terhadap peningkatan postur pertahanan Indonesia. Namun hal ini, memiliki dampak negatif kepada negara-negara tetangga di Asia Tenggara, apabila kebijakan ini tidak dikomunikasikan dengan baik terhadap mereka. Sejarah konflik yang terbentuk diantara negara-negara di Asia Tenggara sangat mungkin akan menimbulkan kecurigaan apabila negara tetangganya kemudian melakukan pembangunan sistem pertahanan dengan memperbaharui atau menambah Alutsista (Rusfiana, 2018, p. 152).

Pembangunan kekuatan pertahanan Indonesia sebagai sebuah kebijakan pertahanan yang harus diimplementasikan untuk mengejar ketertinggalan Alutsista dengan negara-negara lain. Dalam hal ini, Indonesia tentu saja harus mendatangkan berbagai Alutsista dari negara lain maupun dengan menjalin kerja sama pertahanan dengan negara lain demi tercapainya tujuan tersebut. Kebijakan seperti ini tidak jarang akan menimbulkan kekhawatiran dari negara lain terhadap perilaku tersebut ditujukan untuk mempersiapkan diri untuk menyerang negaranya. Terlebih mentalitas konfliktif masih sangat mungkin muncul sebagai prespektif dalam memandang kebijakan yang diambil oleh Indonesia untuk memodernisasi sistem pertahanannya tersebut melalui *platform* MEF yang mana hal ini dapat diwujudkan melalui ADMM.

Relevansi Industri Pertahanan dalam Penguatan Diplomasi Pertahanan Indonesia

Pembelian senjata dari luar negeri merupakan salah satu aktivitas dalam diplomasi pertahanan. Perdagangan peralatan pertahanan (*defence trade*) antar negara akan memperkuat hubungan pertahanan negara-negara tersebut (Bishoyi, 2011, p. 68). Penguatan hubungan tersebut dimungkinkan karena dalam pembelian peralatan pertahanan, seringkali diiringi kerjasama antara militer negara pembeli dengan militer negara penjual dalam hal pendidikan dan pelatihan. Selain itu, kerjasama juga terjadi pada Industri Pertahanan kedua negara, terutama pembelian peralatan pertahanan melalui skema alih teknologi dan produksi bersama.

Kerjasama Industri Pertahanan antar negara adalah salah satu bentuk aktivitas kerjasama pertahanan (*defence cooperation*), dengan kata lain kerjasama pertahanan merupakan istilah

yang tepat untuk menggambarkan diplomasi pertahanan. Sehingga, menguatnya kerjasama Industri Pertahanan Indonesia dengan Industri Pertahanan negara lain, akan menguat pula diplomasi pertahanan yang dilakukan oleh Indonesia. Hal ini disebabkan jangka waktu kerjasama yang cukup panjang dan intensifnya implementasi kerjasama dalam Industri Pertahanan, pertukaran tenaga ahli peralatan pertahanan kedua negara, bertemunya personel militer kedua negara, akan semakin menguatkan hubungan antar negara. Dengan demikian, kerjasama Industri Pertahanan memegang peranan penting dalam diplomasi pertahanan Indonesia (Luthfi, 2021). Dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008, Indonesia telah melakukan kerjasama dengan berbagai negara dalam penyediaan Alutsista dan Industri Pertahanan di antaranya RRC, Korea Selatan, Jepang, Rusia, dan Uni Eropa (Kementerian Pertahanan RI, 2008). Kerjasama pertahanan ini menunjukkan adanya aktivitas diplomasi pertahanan antara Indonesia dan negara-negara tersebut.

Selain itu, terdapat beberapa bentuk kerjasama Industri Pertahanan antar negara yang dapat dilakukan. Bentuk kerjasama dapat dilakukan dengan cara globalisasi, yaitu memperluas partisipasi aktivitas senjata di kancah internasional. Bentuk aktivitas kerjasama ini antara lain: produksi bersama (*co-produce* atau *co-develop*), mendirikan perusahaan ventura bersama (*joint venture*), dan kerjasama Industri Pertahanan dapat terjadi dengan cara alih teknologi (*dual use technology transfer*), penelitian dan pengembangan bersama (*joint research and development*), produksi bersama (*joint production*), dan memasarkan bersama (*joint marketing*) (Luthfi, 2021, p. 66). Di Indonesia, bentuk-bentuk kerjasama Industri Pertahanan dimana setiap pembelian peralatan pertahanan yang belum dapat diproduksi oleh industri dalam negeri, akan disyaratkan dengan alih teknologi.

Industri Pertahanan Indonesia memegang peranan dalam peningkatan kapabilitas Pertahanan Indonesia. Kapabilitas yang cukup, akan berpengaruh terhadap upaya penguatan diplomasi pertahanan Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasional. Kapabilitas pertahanan ini akan lebih baik jika diperkuat dengan Alutsista yang berasal dari Industri Pertahanan dalam negeri. Hal ini dimaksudkan agar kepentingan nasional Indonesia memiliki kedaulatan, bebas dari tekanan politik negara manapun, yang dapat berakibat pada kemungkinan terkena embargo atau pembatasan-pembatasan terhadap peralatan tertentu yang menghambat pembangunan dan pemeliharaan sarana pertahanan.

Keentingan Nasional: Implementasi Diplomasi Pertahanan?

Bagi negara berkembang, dalam hal ini Indonesia, pertahanan menjadi prioritas untuk mempertahankan pembangunan yang sedang dilaksanakan. Selain itu, untuk menikmati dan mengisi kemerdekaan, negara harus melakukan pembangunan yang menggantungkan kepada kemampuan sendiri (*self reliance*) secara berkelanjutan (*sustainable*). Ketiga hal inilah yang akan mempengaruhi kepada kedaulatan. Dalam mewujudkan kedaulatan terdapat pada tiga kategori kepentingan nasional, dimana (Bitzinger, n.d.):

1. Pada kepentingan nasional yang mutlak, yaitu kepentingan atas tegaknya NKRI. Dalam kepentingan nasional ini, maka diplomasi pertahanan diarahkan untuk mendukung fungsi pertahanan dalam menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.
2. Kepentingan nasional yang vital, yaitu kepentingan yang menyangkut pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika, sejahtera, adil, dan makmur, serta demokratis. Dalam kepentingan nasional ini, diplomasi pertahanan dapat diarahkan kepada upaya pencegahan konflik.
3. Kepentingan nasional yang bersifat penting, yaitu kepentingan yang terkait dengan perdamaian dunia dan stabilitas regional, diplomasi pertahanan dapat diarahkan kepada peran aktif bersama-sama dengan negara lain dalam mewujudkan perdamaian dunia.

Dengan tiga kategori kepentingan nasional ini, implementasi diplomasi pertahanan Indonesia terdapat berbagai tantangan yang harus diselesaikan, salah satunya adalah kapabilitas pertahanan yang perlu terus ditingkatkan di tengah anggaran pertahanan yang masih jauh dari memenuhi *Minimum Essential Force* (MEF), serta diantara peningkatan kapabilitas pertahanan di kawasan. Oleh karena itu, perlu adanya komitmen untuk membangun kapabilitas pertahanan sesuai dengan kebutuhan minimal yang benar-benar harus dipenuhi agar tujuan dari kepentingan nasional tersebut dapat tercapai.

KESIMPULAN

Indonesia merupakan negara terbesar di kawasan Asia Tenggara, baik dari segi luas wilayah maupun jumlah populasi. Indonesia juga dipandang strategis dan penting dari sudut pandang kepentingan negara-negara baik di tingkat regional maupun global. Di Asia Tenggara, isu pertahanan telah terwujud dalam diplomasi pertahanan yang telah dilakukan baik secara bilateral maupun multilateral. Dalam bidang pertahanan, ASEAN perlu untuk bekerja sama dengan menggelar pertemuan rutin melalui mekanisme *ASEAN Defence Ministerial Meeting (ADMM)*. ADMM merupakan kerangka untuk menggelar dialog dan mencapai kerjasama dalam bidang praktis untuk menangani masalah yang terkait dengan keamanan baik yang bersifat tradisional dan non-tradisional. Di Indonesia, diplomasi pertahanan telah menjadi alat penting dalam kebijakan pertahanan dan keamanan suatu negara. Hal ini adalah hasil kepercayaan dan apresiasi negara-negara pada pertemuan-pertemuan multilateral untuk mendiskusikan masalah keamanan dalam level regional maupun internasional dalam upaya peningkatan kapabilitas pertahanan dan tujuan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Alunaza, H., & Toy, B. A. (2019). Pengaruh Militer Dalam Sistem Politik Myanmar Terhadap Diskriminasi Etnis Rohingya Pada Tahun 2017. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 15(1), 27–39. <https://doi.org/10.26593/jihi.v15i1.3117.27-39>
- Anwar, S. (2018). Peran Diplomasi Pertahanan dalam Mengatasi Tantangan di Bidang Pertahanan. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 4(2), 79–80. <https://doi.org/10.33172/jpbh.v4i2.332>
- Arif, Putri, D. A. M., Fachrurrozi, M., & Jessika, S. (2020). Strategi Diplomasi Militer Indonesia Terkait Upaya Penyelesaian Konflik Laut Tiongkok Selatan Tahun 2014-2019. *Proyeksi: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 25(2). <https://doi.org/10.26418/proyeksi.v25i2.2616>
- Bishoyi, S. (2011). Defence Diplomacy in US-India Strategic Relationship. *Journal of Defence Studies*, 5(1), 64–86. https://www.idsa.in/system/files/jds_5_1_sbishoyi.pdf
- Bitzinger, R. A. (n.d.). *The Modern Defense Industry: Political, Economic, and Technological Issues*. Greenwood Publishing Group.
- Budi, T. &, & Berantas, S. (2014). Diplomasi Pertahanan sebagai Bagian dari Diplomasi Total RI. *Jurnal Pertahanan*, 4(2), 165–184.
- Cipto, B. (2006). *Hubungan Internasional di Asia Tenggara*. Pustaka Pelajar.
- Kementerian Pertahanan RI. (2008). *Buku Putih Pertahanan Indonesia*.
- Lubis, D. W. (2016). *Diplomasi Pertahanan Indonesia - China Dan Kebijakan Minimum Essential Force Dalam Upaya Indonesia Menjadi Leader State Di Asia Tenggara (2004-2014)* [UNS Surakarta]. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/53025>
- Luthfi, R. M. (2021). *Relevansi Industri Pertahanan Domestik dalam Penguatan Diplomasi Pertahanan Indonesia* [Universitas Al Azhar Indonesia]. <https://eprints.uai.ac.id/1578/1/ILS0031-21.pdf>
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Revisi). PT Remaja Rosdakarya.

- Rusfiana, Y. (2018). Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam ASEAN defence Ministerial Meeting (ADMM). *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 4(2).
<https://doi.org/10.33172/jpbh.v4i2.335>
- Saragih, H. M. (2018). Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Konflik Laut China Selatan. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, 3(1). <https://doi.org/10.34010/jipsi.v8i1.880>
- Triwahyuni, D. (2010). Signifikansi Kawasan Asia Tenggara Dalam Kepentingan Amerika Serikat. *Majalah Ilmiah UNIKOM*, 9(1), 33-44.
https://jurnal.unikom.ac.id/_s/data/jurnal/v09-n01/volume-91-artikel-4.pdf/pdf/volume-91-artikel-4.pdf